BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada dibawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antar sektor publik dan sektor swasta. Proses ini mencakup pencatatan, pengumpulan data, pengikhtisaran, dan perhitungan laporan keuangan. Akuntansi keuangan daerah digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh entitas pemerintah daerah.

Widjaja (2018) Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi indonesia. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terealisasi pasca orde baru. Pada prinsipnya, otonomi daerah diimplementasikan untuk melakukan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini tentu untuk dapat menggeser kekuasaan yang terlalu sentralistik di pusat menuju kekuasaan dan otonomi daerah indonesia Widjaja (2018). Otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana tentang dalam UU No. 32 Tahun 2004. Sehingganya pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan daerah desa.

Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 Ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Oleh karena itu,

pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Semua kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik *(Good Village Governance)*.

Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa menjelaskan secara luas bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pengelolaan dana desa. Tujuan pemerintah memberikan pendampingan dalam pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor, dan mengoptimalkan aset lokal desa.

Menurut Lukito Cahyo (2017) tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. SISKEUDES yaitu aplikasi untuk pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini untuk mempermudah administrasi serta kontrol internal yang tersistem dan berlaku secara nasional sebagaimana instruksi dari Presiden. Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Menurut penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), Wardani & Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Dengan memanfaatkan teknologi proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa rawan akan manipulasi sehingga pemerintah telah memberikan aplikasi sistem keuangan desa agar pengelolaan dana desa yang mendasari pemerintah membuat aplikasi dana desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintah sendiri, pengeluaran keuangan dan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam pengelolaan dana desa adalah SISKEUDES yang telah dikembangkan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 para pengelola keuangan desa dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi SISKEUDES versi terbaru yaitu SISKEUDES 2.0.

SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. SISKEUDES yaitu aplikasi untuk pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pengaministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini untuk mempermudah administrasi serta kontrol internal yang tersistem dan berlaku secara nasional sebagaimana intruksi dari presiden. SISKEUDES merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Menurut penelitian Aziz dan Prastiti (2019), Sugiarti dan Yudianto (2017), Wardani dan Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah akses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa rawan akan manipulasi sehingga pemerintah telah memberikan aplikasi sistem keuangan desa agar pengelolaan dana desa. Yang mendasari pemerintah membuat aplikasi dana desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintah sendiri, pengeluaran keuangan dan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna) dalam pengelolaan dana desa adalah Siskeudes yang telah dikembangkan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 para pengelola keuangan desa dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat" (QS. An-Nisa:58)

Ayat di atas menjelaskan tujuan pengelolaan dapat diartikan memimpin, mengendalikan, mengatur dan berusaha menjadi lebih baik, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilakukan. Pengelolaan merupakan tahapan pembantu dalam membuat rumusan kebijakan dan tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan capaian yang dituju.

Kelebihan SISKEUDES yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya. Kelebihan SISKEUDES tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Darwin (2017) menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES memberikan dampak yang cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Informasi SISKEUDES dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

SISKEUDES selain mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan yaitu pengguna sulit memahami aplikasi SISKEUDES karena aplikasi ini masih baru dan sumber daya manusia yang belum familiar dengan aplikasi tersebut sehingga harus mengikuti banyak pelatihan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Afrizal et al. (2016) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES terdapat permasalahan berupa belum tersedianya SDM yang memadai dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Siswandi et al (2019) yang menunjukan ada hubungan yang signifikan antara pelatihan komputer dengan efektifitas karyawan. Sehingganya aplikasi ini dalam penerapannya belum semua desa yang menggunakan, hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Telaga Biru terdapat 15 (lima belas) desa, namun hanya terdapat 9 (sembilan) desa yang telah menerapkan SISKEUDES yaitu desa Pentadio Barat, Pentadio Timur, Ulapato A, Ulapato B, Dumati, Tuladenggi, Pantungo, Tuladenggi dan Desa Dulamayo Utara. Dalam hal keuangan desa SISKEUDES memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendoromg

mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan SISKEUDES harus lebih di perhatikan.

Berdasarkan hasil observasi dengan pemerintah desa dalam hal ini yang diwakili oleh Kasie Pemerintahan mengatakan sebelum diterapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di temukan adanya pengungkapan dan penyajian informasi-informasi dalam integritas laporan keuangan yang berisi data-data akuntansi yang menggambarkan realita ekonomi tidak di ungkapkan secara jujur di karenakan kurang adanya audit secara efisien dan tanggung jawab terhadap keuangan dana desa serta versi SISKEUDES yang berubah-ubah sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016. Setelah diberlakukan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan Kaur Keuangan yang sekarang mengatakan dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan pelaporan keuangan desa hanya saja mereka terkendala dengan jaringan internet yang kurang memadai sehingga mereka melakukan pencatatan pelaporan keuangan kembali jika jaringan internet sudah stabil kembali. Desa Dulamayo Utara ini juga merupakan desa yang telah menerapkan SISKEUDES sejak tahun 2016 setelah dilakukan *launching* pada 13 Juli 2015. Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa di temukan dalam proses pengelolaan keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Penelitian terdahulu mengenai sistem keuangan desa ini telah dilakukan yakni oleh : Made Pradana Adiputra (2020) dengan judul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.3 dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa selama pandemi Covid-19 di Desa Kalibukbuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer melalui observasi dan wawancara dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Kalibukbuk. Metode analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 sudah dilakukan secara terstruktur. (2) Kualitas akuntabilitas SISKEUDES Versi 2.0.3 dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. (3) Dampak positif SISKEUDES terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kalibukbuk.

Angela Ayu (2020) dengan judul "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi SISKEUDES di Desa Banyuanyar Boyolali". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar Boyolali dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban melalui aplikasi SISKEUDES (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik. Namun terdapat sedikit perbedaan pada pengimplementasikan tahapan pertanggung jawaban yang tidak melakukan proses pengimputan pada laporan pertanggung jawaban melalui aplikasi SISKEUDES, namun peran SISKEUDES hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggung jawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar Boyolali. Aplikasi SISKEUDES secara online dengan menyatakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali.

Fikriyani (2019) dengan judul "Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi sumatera Selatan Tahun 2017)". Metode yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES ini sudah berhasil diterapkan di Desa tersebut, diukur dari tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta

memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien dan juga transparansi.

Aziza Novirania (2018), dengan judul "Implementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran". Metode yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini ialah pemahaman pemerintah desa terhadap program SISKEUDES sudah paham serta keterbukaan terkait keuangan desa lebih baik, selain itu semangat dan kemajuan para perangkat desa sudah baik dikarenakan SISKEUDES dianggap sangat memudahkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini menggunakan empat indikator untuk mengukur pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, untuk menganalisis lebih lanjut pengelolaan dana desa menggunakan SISKEUDES, maka dalam penelitian ini berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1.2.1 Pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap dana desa yang tidak disajikan secara menyeluruh

1.2.2 Kurang adanya audit secara efisien dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa

1.2.3 Penggunaan SISKEUDES yang terkendala dengan jaringan internet

1.2.4 Ketidak akuratan pencatatan laporan keuangan

1.3 Fokus Masalah

1.3.1 Bagaimana Pengelolaan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

1.3.2 Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pemerintah Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan bagi pihak luar pada umumnya mengenai SISKEUDES. Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan guna beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digital dan memanfaatkan dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya terkait SISKEUDES dan membuktikan kesesuain antara teori-teori yang ada dengan praktek yang sesungguhnya terjadi di lapangan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh adalah belajar cara mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik, bahan suatu masalah, meningkatkan suatu masalah hubungan antara rekan kerja, melatih diri dalam bertanggung jawab serta bertambahnya wawasan, pengetahuan maupun pengalaman terkait SISKEUDES.